

---

---

**MODEL PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM RESPON TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI NOVEMBER 2022 DI KABUPATEN CIANJUR – JAWA BARAT**

**Anton Roy Purnama S.Psi<sup>1</sup>, Prof. Dr.Phil. Toetik Koesbardiati<sup>2</sup>, Dra, DR.**

**Christrijogo Sumartono W., dr., Sp.An. KAR<sup>3</sup>**

**Universitas Airlangga, Surabaya**

email: <sup>1</sup>anton.roy.purnama@gmail.com, <sup>2</sup>toetik.koesbardiati@fisip.unair.ac.id,

<sup>3</sup>christrijogo@fk.unair.ac.id

**Abstract:** *Inclusive disaster management is a crucial aspect of humanitarian efforts, ensuring that vulnerable groups, including persons with disabilities, have equal access to early warning systems, evacuation procedures, and emergency aid. This study aims to develop a model for engaging persons with disabilities in disaster response, focusing on experiences from the 2022 Cianjur earthquake. The research employs a qualitative case study approach, incorporating in-depth interviews, participatory observations, and policy analysis. The findings reveal that persons with disabilities face significant barriers in accessing disaster-related information, inadequate disability-friendly evacuation shelters, and limited involvement in disaster response planning. However, best practices were also identified, including the adaptation of audio-visual early warning systems and the active participation of disability communities in emergency response efforts. Based on these findings, this study recommends an engagement model that includes capacity building for persons with disabilities, strengthening inclusive policies, and integrating their representation into disaster management structures. This model is expected to enhance disaster preparedness and response efforts, ensuring greater inclusivity and effectiveness for all community groups.*

**Keyword:** *Inclusive disaster management, persons with disabilities, emergency response, disaster policy, accessibility.*

**Abstrak:** Penanggulangan bencana yang inklusif merupakan aspek penting dalam upaya kemanusiaan, terutama dalam memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap sistem peringatan dini, evakuasi, dan bantuan darurat. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model pelibatan penyandang disabilitas dalam respon darurat bencana, dengan fokus pada pengalaman di Cianjur pascagempa tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam akses informasi kebencanaan, fasilitas pengungsian yang tidak ramah disabilitas, serta minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan kebijakan tanggap darurat. Namun, ditemukan pula praktik baik dalam adaptasi sistem peringatan dini berbasis suara dan visual, serta keterlibatan komunitas disabilitas dalam respon bencana yang efektif. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan model pelibatan yang mencakup peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, penguatan kebijakan inklusif, serta pengintegrasian representasi mereka dalam struktur kelembagaan kebencanaan. Model ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana yang lebih inklusif dan efektif bagi semua kelompok masyarakat.

**Kata kunci:** Penanggulangan bencana inklusif, penyandang disabilitas, respon darurat, kebijakan kebencanaan, aksesibilitas.

## PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa sekitar 15% populasi dunia merupakan penyandang disabilitas (Organisasi Kesehatan Dunia, 2011). Perkiraan ini kemudian digunakan untuk memperkirakan jumlah penyandang disabilitas di suatu daerah. Menurut *Humanity and Inclusion* (2021), penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena dampak krisis/bencana dan risiko lebih tinggi untuk tidak disalurkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pascabencana. Sejumlah hambatan, baik terkait kondisi lingkungan maupun sikap dan diskriminasi, meningkatkan risiko keterbelakangan dan marginalisasi penyandang disabilitas. Sehubungan dengan hal ini, beberapa upaya telah dimulai untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2008 dan Pedoman inklusi penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan dari *Inter-Agency Steering Committee* (IASC) yang diluncurkan pada tahun 2019.

Di balik inklusi yang diminta oleh pedoman global, dalam banyak situasi, partisipasi penyandang disabilitas masih belum seimbang, baik sebagai penyintas maupun sebagai pelaksana kegiatan kemanusiaan. Dibandingkan dengan masyarakat umum, penyandang disabilitas empat kali lebih besar kemungkinannya menjadi korban bencana (UNESCAP, 2014). Dalam situasi yang disebutkan di atas, penyandang disabilitas masih sering diabaikan dalam siklus penanggulangan bencana, khususnya dalam operasi tanggap darurat bencana, dan jarang terlihat sebagai aktor yang memberikan kontribusi signifikan (CBM, 2013).

Demi mengurangi dampak bencana, perhatian pada masyarakat berisiko salah satunya disabilitas sangat diperlukan. Pada tahun 2015, kerangka partisipasi bermakna dari penyandang

disabilitas dan organisasinya telah dituangkan, baik langsung maupun tidak langsung dalam kerangka *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* (Stough & Kang, 2015). Namun *SFDRR* tidak serta merta menghasilkan implementasi seperti yang diharapkan. Ketimpangan implementasi ditemukan sebagaimana disampaikan oleh penelitian Craig, dkk. (2019) yang melakukan komparasi respon bencana pada penyandang disabilitas di Amerika Serikat, Australia, dan Filipina. Penelitian tersebut menemukan adanya keterbatasan alokasi sumber daya dan perbedaan kultur yang menjadi hambatan untuk melibatkan penyandang disabilitas. Salah satu hambatan yang bersifat kultural adalah stigma mengenai kelompok disabilitas sebagai kelompok yang membutuhkan ‘pertolongan’ (*help*) dibanding membutuhkan ‘pemberdayaan’ (*empowerment*). Akibatnya, menimbulkan persepsi bahwa orang dengan disabilitas adalah objek kepedulian masyarakat yang menimbulkan normalisasi bahwa mereka kurang mampu jika dibanding dengan masyarakat umum. Hambatan lainnya adalah kurangnya sumber daya yang dipersiapkan bagi penyandang disabilitas pada keseharian maupun pada situasi darurat. Hal ini tampak dari kurangnya pelatihan bagi penyandang disabilitas yang mengakibatkan ketidaktahuan mereka saat menghadapi bencana.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) (2012) mencatat pentingnya partisipasi bermakna penyandang disabilitas di seluruh siklus manajemen bencana, termasuk perencanaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan proses pemulihan. Upaya ini dinilai mampu menurunkan tingkat risiko bagi penyandang disabilitas secara signifikan dan meningkatkan kualitas kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan pemerintah. Njelesani dkk. Tahun 2012 menyebutkan dan merinci beberapa hak penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, diantaranya:

1. Membangun komitmen multi pihak, termasuk dengan organisasi penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana, dan secara teratur meninjau ulang kesepakatan tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
2. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses pengambilan Keputusan.
3. Mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan menangani korban disabilitas dalam situasi krisis.
4. Menerapkan prinsip “*Universal Design*” dalam pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung.

Dengan melakukan empat upaya diatas, penyandang disabilitas sebagai kelompok paling berisiko dapat secara efektif berpartisipasi secara bermakna pada setiap siklus penanggulangan bencana baik saat sebelum bencana, pada saat respon tanggap darurat, maupun pemulihan pasca bencana. Risiko yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat dikurangi dengan menyertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemenuhan kebutuhan yang inklusif.

Kondisi geografis Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Sehingga, sudah semestinya pemerintah Indonesia memperhatikan keselamatan warga negara dalam pengurangan risiko bencana. Undang – undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sebagai kelompok paling berisiko perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan. Perlindungan ini dilakukan dengan memberikan prioritas dalam situasi bencana diantaranya adalah pengamanan, penyelamatan dan evakuasi,

layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Namun demikian, dukungan nyata terkait penanganan pada kelompok disabilitas belum diberlakukan secara khusus sebagaimana disebutkan oleh Probosiwi (2013). Diskriminasi penyandang disabilitas dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, maupun upaya penanggulangan bencana secara umum di Indonesia masih kerap terjadi, baik karena minimnya pengetahuan mengenai disabilitas maupun anggapan atau stigma bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok lemah.

Indonesia memerlukan perubahan progresif yang disesuaikan dengan kerangka penanggulangan bencana global serta cerminan dari praktik kemanusiaan untuk membangun aksi kemanusiaan yang inklusif, akuntabel, dan berpusat pada masyarakat. Penanggulangan bencana sebaiknya disesuaikan dengan *Sendai Framework* yang memiliki prinsip partisipasi dan kolaborasi dengan semua pihak, dengan cara memberikan kemudahan akses dan non-diskriminasi serta mendukung pihak-pihak yang secara tidak proporsional “ditempatkan” dalam risiko yang lebih tinggi dimana penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok tersebut (SFDRR, 2015; Siregar & Wibowo, 2019).

Tepat pada saat perbincangan mengenai peran serta penyandang disabilitas dalam respon tanggap darurat bencana banyak didiskusikan, beberapa organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur secara aktif terlibat dalam respon tanggap darurat. Mereka terlibat dalam respon tanggap darurat bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada bulan November 2022 yang lalu. Sejak awal, para penyandang disabilitas, terutama mereka yang aktif dalam organisasi penyandang disabilitas, secara proaktif menghubungi pihak-pihak yang dianggap dapat membantu dan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas. Dengan dukungan dari beberapa organisasi kemanusiaan, mereka menjalankan operasi tanggap darurat bencana.

Didalam laporan kegiatan respon tanggap darurat yang disusun oleh IBU Foundation (IBU Foundation, 2022), mereka secara rinci menyebutkan bentuk – bentuk kegiatan yang mereka lakukan diantaranya adalah kaji cepat bersama (*inclusive rapid need assessment*) untuk mengidentifikasi dampak bencana khususnya kepada penyandang disabilitas, melakukan distribusi bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana, memberikan dukungan psikososial, serta melakukan advokasi untuk mendorong respon kemanusiaan dan pemulihan pasca bencana agar lebih inklusif kepada pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan lainnya (IBU Foundation, 2022). Namun, dalam laporan evaluasi ini tidak banyak disebutkan mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi inisiatif penyandang disabilitas dan organisasinya di Cianjur dan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam respon tanggap darurat bencana.

Atas dasar situasi ini, penulis melihat bahwa partisipasi penyandang disabilitas dan organisasinya dalam respon tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Cianjur dapat dijadikan sebuah percontohan/model sehingga dapat direplikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjadi motivasi bagi penyandang disabilitas dan organisasinya bahwa mereka mampu untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana. Pengembangan model dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang memungkinkan (terkait kesempatan dan akses) dan memungkinkan (terkait kapasitas) yang ada dalam situasi tanggap darurat di Cianjur, sehingga para penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam penanganan darurat bencana di Cianjur.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Menurut Heriyanto (2018), analisis tematik adalah suatu cara menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini merupakan metode yang sangat efektif apabila tujuan penelitiannya adalah untuk melihat secara detail data kualitatif, harus menemukan pola-pola yang berkaitan dengan fenomena tersebut dan menjelaskan sejauh mana terjadinya fenomena tersebut melalui kacamata peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang merepresentasikan stakeholder yang terlibat dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam respon darurat bencana di Kabupaten Cianjur tahun 2022, sebagai berikut:

Organisasi	Jumlah Informan
Organisasi Penyandang Disabilitas	2
Organisasi Non Pemerintah (NGO)	1
Organisasi Non Pemerintah Internasional (INGO)	1

Dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, peneliti ingin mengetahui bagaimana penyandang disabilitas dan organisasinya di Cianjur dapat terlibat dalam tanggap darurat bencana melalui “enabling factors”, baik dari sudut pandang organisasi penyandang disabilitas, maupun dari sudut pandang pemerintah dan organisasi non pemerintah. Lebih jauh, peneliti ingin melihat apakah terdapat konteks-konteks spesifik yang memungkinkan dan memungkinkan penyandang disabilitas di Cianjur dapat terlibat dalam respon tanggap darurat bencana tersebut.

## Sumber Pustaka/Rujukan

Berikut ini adalah artikel-artikel penelitian sebelumnya yang digunakan

sebagai salah satu rujukan. Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian dan catatan-catatan tentang pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana adalah pada fase pra bencana, baik itu dalam konteks pengurangan risiko bencana, maupun dalam konteks mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sulit sekali menemukan kasus atau fenomena dimana penyandang disabilitas yang terlibat dalam operasi respon tanggap darurat bencana. Karena untuk menemukan fenomena ini, kita membutuhkan dua hal yang cukup sulit ditemui yaitu, Pertama, penyandang disabilitas dan organisasinya yang memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menjalankan operasi tanggap darurat bencana. Kedua, adalah fenomena bencananya itu sendiri.

1. Craig, L., Craig, N., Calgaro, E., Dominey-Howes, D., & Johnson, K. (2019). People with disabilities: Becoming agents of change in disaster risk reduction. In *Emerging voices in natural hazards research*. Butterworth-Heinemann.
2. Luthfia, A. R. (2020). Urgensi pemberdayaan penyandang disabilitas di masa pandemi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
3. Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., & Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*.
4. Sloman, A., & Margaretha, M. (2018). The Washington Group Short Set of Questions on disability in disaster risk reduction and humanitarian action: Lessons from practice. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.
5. Susanti, B. A. D., & Aprilia, E. N. (2020). Family disaster planning untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap disabilitas dalam menghadapi bencana. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam konteks penanggulangan bencana merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan tetapi juga aktor yang berperan aktif dalam setiap tahapan kebencanaan. Menurut Hemingway dan Priestley (2014), partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan kebencanaan meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana dan memperkuat kapasitas masyarakat secara keseluruhan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghambat keterlibatan mereka dalam respon darurat bencana.

Penelitian ini menemukan bahwa organisasi inklusi memainkan peran penting dalam membangun jejaring dan meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam tanggap bencana. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak dan potensi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan progresif yang memastikan representasi penyandang disabilitas dalam struktur kelembagaan penanggulangan bencana.

Menurut Wisner et al. (2012), pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kebencanaan harus berlandaskan prinsip inklusi, partisipasi aktif, dan aksesibilitas yang setara. Pemberdayaan ini mencakup:

1. **Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas** melalui pelatihan kesiapsiagaan bencana.
2. **Peningkatan aksesibilitas terhadap informasi dan infrastruktur tanggap darurat.**
3. **Integrasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan kebencanaan.**

#### 4. **Pembangunan jejaring komunitas yang memperkuat keterlibatan mereka dalam respons bencana.**

Dalam wawancara dengan salah satu anggota organisasi penyandang disabilitas di Cianjur, seorang responden menyatakan:

*"Kami sering dianggap hanya sebagai kelompok rentan yang perlu dibantu, padahal kami juga bisa berkontribusi. Jika diberikan kesempatan dan pelatihan, kami bisa membantu dalam evakuasi dan mendukung komunitas kami sendiri."*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam respon bencana, antara lain:

#### **Kurangnya Representasi dalam Struktur Kebencanaan**

Meskipun berbagai kebijakan telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mereka masih kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan kebencanaan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemerintah daerah belum memiliki mekanisme yang efektif untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan tanggap darurat.

Dalam sebuah wawancara, seorang pemimpin komunitas disabilitas menyebutkan: *"Kami sering tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana tanggap bencana. Padahal, siapa yang lebih memahami kebutuhan kami selain kami sendiri?"*

#### **Stigma dan Stereotip Sosial**

Stigma yang masih melekat di masyarakat membuat penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam respon bencana. Hemingway dan Priestley (2014) mengungkapkan bahwa hambatan sosial ini sering kali lebih signifikan dibandingkan hambatan fisik dalam proses inklusi penyandang disabilitas.

Seorang penyandang disabilitas yang aktif dalam kegiatan kebencanaan menuturkan: *"Ketika kami mencoba membantu dalam proses evakuasi, sering kali orang lain ragu terhadap kemampuan kami. Padahal, dengan strategi yang tepat, kami bisa memberikan kontribusi besar."*

#### **Aksesibilitas terhadap Informasi dan Pelatihan**

Akses terhadap informasi kebencanaan masih menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan. Kelman et al. (2020) menekankan bahwa sistem peringatan dini yang inklusif harus menyediakan informasi dalam berbagai format, seperti teks braille, video dengan bahasa isyarat, dan audio deskripsi.

Seorang penyandang tunanetra menyatakan: *"Saat gempa terjadi, saya tidak tahu harus ke mana karena tidak ada panduan khusus bagi kami. Jika ada sistem informasi yang lebih ramah disabilitas, pasti kami bisa lebih siap."*

Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam respon bencana bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kebencanaan. Dengan meningkatkan representasi mereka dalam kebijakan kebencanaan, menghapus stigma sosial, serta menyediakan infrastruktur dan informasi yang inklusif, penyandang disabilitas dapat menjadi aktor yang signifikan dalam penanggulangan bencana. Implementasi strategi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi inklusi untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam menghadapi bencana.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden: *"Kami tidak ingin hanya dianggap sebagai korban. Kami ingin menjadi bagian dari solusi."*

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kebencanaan. Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kebencanaan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga aktor aktif dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Berbagai strategi dapat diterapkan guna meningkatkan peran serta penyandang disabilitas dalam ekosistem kebencanaan yang inklusif. Diantaranya adalah:

### **Meningkatkan Kapasitas Melalui Pelatihan dan Simulasi**

Salah satu pendekatan utama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah melalui peningkatan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi darurat. Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas menjadi kebutuhan mendesak, mengingat bahwa sebagian besar program pelatihan yang ada masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka.

Pelatihan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti cara mengenali tanda-tanda awal bencana, teknik bertahan hidup yang sesuai dengan keterbatasan fisik atau sensorik yang dimiliki, serta prosedur evakuasi yang aman dan efektif. Modul edukasi yang digunakan dalam pelatihan ini harus berbasis pengalaman nyata yang pernah dialami oleh penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Misalnya, studi kasus dari individu tunanetra yang berhasil menyelamatkan diri saat gempa bumi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang relevan bagi peserta pelatihan lainnya.

Lebih lanjut, simulasi evakuasi yang melibatkan penyandang disabilitas menjadi bagian krusial dalam memastikan bahwa mereka memiliki strategi bertahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam simulasi ini, mereka tidak hanya berlatih cara mengevakuasi diri

tetapi juga menguji apakah jalur evakuasi yang tersedia benar-benar dapat diakses oleh mereka. Simulasi ini juga membantu petugas dan relawan memahami bagaimana cara terbaik dalam memberikan bantuan yang tepat kepada penyandang disabilitas selama proses evakuasi.

### **Meningkatkan Keterlibatan dalam Perencanaan Kebencanaan**

Penyandang disabilitas sering kali tidak terlibat dalam perencanaan kebencanaan, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mengintegrasikan perwakilan penyandang disabilitas dalam komite penanggulangan bencana di tingkat lokal maupun nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa perspektif mereka turut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi antara organisasi penyandang disabilitas dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat guna menciptakan kebijakan kebencanaan yang lebih inklusif. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyusunan panduan evakuasi yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, penyesuaian infrastruktur pengungsian, serta pengembangan program pelatihan yang lebih inklusif.

Selain itu, forum konsultatif yang memungkinkan penyandang disabilitas menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan harus dikembangkan. Forum ini dapat berupa pertemuan rutin atau diskusi publik yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan komunitas lokal. Dengan adanya forum ini, penyandang disabilitas dapat lebih mudah menyuarakan aspirasi mereka, baik dalam hal kebijakan mitigasi maupun dalam strategi respons bencana yang lebih inklusif.

### **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Menghilangkan Stigma**

Selain penguatan kapasitas dan keterlibatan dalam perencanaan, upaya pemberdayaan penyandang disabilitas juga perlu difokuskan pada perubahan persepsi di masyarakat. Masih banyak

stigma yang berkembang, di mana penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kelompok yang sepenuhnya bergantung pada bantuan, bukan sebagai individu yang dapat berkontribusi dalam situasi darurat.

Kampanye edukasi menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kapasitas penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, serta kegiatan komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi bencana juga merupakan langkah efektif dalam mengubah persepsi publik. Misalnya, testimoni dari penyandang disabilitas yang berhasil menyelamatkan diri atau membantu orang lain dalam situasi bencana dapat memberikan gambaran bahwa mereka bukan sekadar korban, tetapi juga mampu bertindak dalam kondisi darurat.

Media juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, mendorong media untuk menampilkan kisah sukses penyandang disabilitas dalam kebencanaan dapat menjadi cara untuk menginspirasi masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang sama dalam menghadapi bencana.

### **Mengembangkan Infrastruktur dan Sistem Informasi yang Inklusif**

Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kebencanaan tidak dapat dilepaskan dari penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas. Salah satu kendala utama yang dihadapi penyandang

disabilitas dalam situasi darurat adalah sulitnya mengakses jalur evakuasi yang tersedia. Banyak fasilitas umum, termasuk tempat pengungsian, belum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti kurangnya ramp bagi pengguna kursi roda atau tidak tersedianya papan petunjuk dalam huruf braille bagi tunanetra.

Oleh karena itu, penting untuk membangun jalur evakuasi yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, tempat pengungsian juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung mobilitas dan kenyamanan mereka, seperti toilet yang ramah disabilitas serta area khusus yang dapat digunakan untuk kebutuhan medis atau terapi.

Selain aspek infrastruktur, sistem informasi kebencanaan juga perlu disesuaikan agar dapat menjangkau penyandang disabilitas secara lebih efektif. Sistem peringatan dini yang digunakan dalam berbagai bencana sering kali hanya disampaikan dalam format audio atau visual tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok disabilitas.

Sebagai solusi, sistem peringatan dini harus dikembangkan dalam berbagai format komunikasi, seperti alarm visual yang dapat diakses oleh penyandang tunarungu, serta peringatan suara yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra. Teknologi berbasis pesan teks atau aplikasi yang dilengkapi dengan fitur aksesibilitas juga dapat menjadi alternatif untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu.

Tidak hanya itu, layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam situasi darurat juga perlu diperkuat. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh relawan yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang cara membantu penyandang disabilitas dalam evakuasi maupun dalam mengakses layanan di tempat pengungsian. Dengan

adanya pendampingan ini, penyandang disabilitas dapat lebih mudah menavigasi berbagai tantangan yang mereka hadapi selama masa darurat.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap berbagai dinamika partisipasi penyandang disabilitas dalam respon darurat bencana gempa bumi di Cianjur tahun 2022. Dalam situasi darurat, penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Hambatan yang mereka hadapi meliputi keterbatasan akses terhadap informasi darurat, minimnya infrastruktur yang mendukung mobilitas mereka di lokasi pengungsian, serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan selama fase tanggap darurat.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses informasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pendengaran dan penglihatan. Informasi mengenai jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta bantuan yang tersedia sering kali tidak disampaikan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti dalam bentuk braille bagi tunanetra atau penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat, yang berakibat pada keterlambatan evakuasi dan meningkatnya risiko yang mereka hadapi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi fasilitas pengungsian yang tidak inklusif menjadi hambatan serius bagi penyandang disabilitas. Sebagian besar lokasi pengungsian yang didirikan pasca-gempa tidak memperhitungkan kebutuhan aksesibilitas, seperti jalur evakuasi yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda

atau tersedianya toilet yang dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian mereka dalam menghadapi situasi darurat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai inisiatif positif yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sendiri maupun oleh organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu inklusi. Beberapa penyandang disabilitas yang memiliki pengalaman dalam komunitas mereka berperan aktif dalam menyebarkan informasi kepada sesama penyandang disabilitas dan membantu advokasi terhadap pemenuhan kebutuhan khusus mereka. Selain itu, beberapa organisasi berbasis komunitas telah berperan dalam menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas selama masa tanggap darurat, seperti pendampingan psikososial dan distribusi bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kebijakan dan praktik inklusif dalam penanggulangan bencana di masa depan. Pemerintah dan lembaga kemanusiaan perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi program tanggap darurat. Simulasi bencana yang melibatkan penyandang disabilitas, penyediaan informasi yang lebih aksesibel, serta pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas merupakan beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih setara dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak—termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, serta penyandang disabilitas itu sendiri—perlu ditingkatkan agar respons bencana dapat lebih efektif dan inklusif. Tanpa adanya komitmen yang kuat

terhadap inklusi, penyandang disabilitas akan terus menghadapi risiko tinggi dalam setiap kejadian bencana. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak dalam pengelolaan bencana, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan layanan kemanusiaan yang layak.

Dengan mengembangkan sistem tanggap darurat yang lebih inklusif, diharapkan di masa mendatang penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat dalam situasi bencana, tetapi juga dapat berperan aktif dalam memperkuat ketangguhan komunitas mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, R. A. (2020). *Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia*. Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat, 1(1), 1-7.
- Bunbury, Stephen (2019). *Unconscious bias and the medical model: How the social model may hold the key to transformative thinking about disability discrimination*. International Journal of Discrimination and the Law, 19(1), 26–47.
- Calgaro, E. (2017). *Making DiDRR a Reality: A Three-Step Approach to Empowering People with Disabilities to Become Agents of Change and Resilience. Co-designing Disaster Risk Reduction Solutions*, 29.
- Carvalho, A., Pratama, A. A., & Rianawati, E. (2016). *The most effective Social Protection measures for building resilience in children in the face of natural disasters in the Cianjur District*.
- CBM Global Disability Inclusion. (2013). *Disability iInclusive Disaster Risk Management: Voices from the Field and Good Practices*. Christian Blind Mission (CBM).
- Center of Disease Control and Prevention. (2020). *Common Barriers to Participation Experienced by People with Disabilities*. [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)
- Craig, L., Craig, N., Calgaro, E., Dominey-Howes, D., & Johnson, K. (2019). *People with disabilities: becoming agents of change in disaster risk reduction. In Emerging voices in natural hazards research* (pp. 327-356). Butterworth-Heinemann.
- Fuad, Bahrul, M.A. (2022). *Kebijakan Pendidikan bagi Disabilitas Harus Berlandaskan HAM*. [www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id)
- Hartono, Y. (2021). *Gender-Based Sustainable Disaster Response Education to Anticipate the Problem of Women's Vulnerability*. Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, 5(1), 63-71.
- Hastuti, R. K. D., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2019). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas*. Constraints to realising inclusive development of persons with disabilities]. Working paper, SMERU Research Institute, Jakarta.
- Heriyanto, 2018. Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3679/2059>
- Humanity & Inclusion. (May, 2021). *Inclusive Humanitarian Action (IHA)*. Retrieved from [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet\\_Inclusive%20Humanitarian%20Action\\_HI\\_2021%20%28002%29.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Inclusive%20Humanitarian%20Action_HI_2021%20%28002%29.pdf)
- IBU Foundation, 2022. Laporan Kegiatan Respon Tanggap Darurat Gempabumi Cianjur November 2022 – Januari 2023. IBU Foundation.
- Kadiyono, A. L., & Harding, D. (2017). *Pengaruh nilai budaya sunda dalam upaya peningkatan kesejahteraan psikologis korban bencana tanah*

- longsor*. Journal of Psychological Science and Profession, 1(3), 26-35.
- Kementerian Kesehatan R. (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, Kemenkes RI, 2017. Retrieved from <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian>
- Kharisma, I., & Sagala, S. (2018, April). *Implementation of Spatial Data Infrastructure in Cianjur District for disaster risk management purposes*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 145, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
- Kurnia, Firdilla. 2023. *Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*. <https://dailysocial.id/post/analisis-data>
- Kusmajaya, S., & Wulandari, R. (2019). *Kajian Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur*. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 10(1), 39- 51.
- Lunga, Wilfred; Pathias Bongo, Paradzayi; van Niekerk, Dewald; Musarurwa, Charles (2019). *Disability and disaster risk reduction as an incongruent matrix: Lessons from rural Zimbabwe*. *Jambá Journal of Disaster Risk Studies*, 11(1).
- Luthfia, A. R. (2020). *Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi*. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 38-44.
- Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., & Nixon, S. (2012). *Using a human rights- based approach to disability in disaster management initiatives*. *Natural Disasters*, 21-46.
- Pauji, M. R., Maryani, E., & Ruhimat, M. (2017). *Households Community Preparedness in Dealing with Landslides*. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 1(2), 84-88.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2019). *People with disabilities as key actors in community-based disaster risk reduction*. *Disability & Society*, 34(9- 10), 1419-1444.
- Probosiwi, R. (2013). *Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana*. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 4(2), 77-86.
- Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., & Fadil, A. M. (2020). *Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan*. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- Santoso, A. D. (2015). *Disabilitas dan Bencana (Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2033-2039.
- Shaleh, I. (2018). *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). *Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 23-44.
- Slovan, A., & Margaretha, M. (2018). *The Washington Group Short Set of Questions on disability in disaster risk reduction and humanitarian action: lessons from practice*. *International journal of disaster risk reduction*, 31, 995-1003.
- Stough & Kang (2015). *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and Person With Disabilities*. *International Journal of Disaster Risk Services*.

- Sudarwari, Erlin. SKM., MM. (2016). *Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan TNI*. Retrieved from 5. <https://www.kemhan.go.id/pusreh-ab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html#:~:text=Selain%20itu%2C%20dalam%20Undang%20Undang,Intelektual%2C%20dan%20Penyandang%20Disabilitas%20Sensoris>
- Susanti, B. A. D., & Aprilia, E. N. (2020). *Family Disaster Planning Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Disabilitas Dalam Menghadapi Bencana*. Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan, 9(2), 183-191.
- Syafi'ie, M. (2014). *Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas*. INKLUSI Journal of Disability Studies, 1(2), 269-308.
- United Nations. (2012). *Disability, Natural Disasters and Emergency Situations*. Retrieved from [www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546](http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546)
- UNESCAP (2014). *ESACP Annual report 2014*.
- Utami, T. K. (2019). *Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 11(2), 131-139.
- Winoto, Y. (2017). *Model Strategi Komunikasi Resiko Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam di Kabupaten Pangandaran (Studi Tentang Pendidikan Publik dalam Membentuk Masyarakat Tangguh Bencana di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*. Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi), 3(2).
- World Health Organization (2011). *Summary World Report on Disability*. World Health Organization – The World Bank.
- Zaida, Nur Alifa. Dkk (2019). *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Praktik Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah: Pendekatan Teori KAP*.